

## Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia Pra-Kemerdekaan: Peran Organisasi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

firman<sup>1</sup>, Isara Abda Noka Firman<sup>2\*</sup>, Adha Saputra<sup>3</sup>, Muhammad Faiz<sup>4</sup>,  
Muhadi<sup>5</sup>, Anwar Jayadi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> IAIN Takengon, Aceh Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author: [isaraabdanoka@gmail.com](mailto:isaraabdanoka@gmail.com)

DOI: 10.61693/elwasathy.vol41.2026.169-178



Copyright © 2026 penulis

Diajukan: 25/05/2026

Diterima: 05/06/2026

Diterbitkan: 06/06/2026

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemikiran dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan, dengan fokus pada peran Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kajian dilatari ketimpangan sosial-ekonomi akibat struktur kolonial yang memarginalkan pedagang pribumi Muslim. Penelitian menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis dan analisis isi terhadap sumber primer, terutama Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto, serta sumber sekunder. Analisis dibedakan pada tataran aktor (*gagasan tokoh pada zamannya*) dan tataran analis (*pembacaan dengan kerangka maqashid al-syari'ah*). Hasil kajian menunjukkan bahwa Sarekat Islam merumuskan gagasan 'sosialisme Islam' sebagai perlawanan terhadap kapitalisme kolonial sekaligus melindungi pedagang pribumi; Muhammadiyah memperkuat modal manusia dan filantropi terlembaga berbasis teologi al-Ma'un; sementara Nahdlatul Ulama menumbuhkan koperasi pedagang melalui Nahdlatut Tujjar (1918) dan ekonomi pesantren. Ketiganya membentuk satu spektrum respons ekonomi Islam yang konvergen pada kemandirian, keadilan, dan solidaritas, meski berbeda basis sosial dan strateginya. Penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pra-kemerdekaan memiliki relevansi kuat bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer berbasis komunitas.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam; Nahdlatut Tujjar; Organisasi Islam; Pra-Kemerdekaan;

### ABSTRACT

This study examines Islamic economic thought and movements in Indonesia during the pre-independence period, focusing on the roles of Sarekat Islam, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama in empowering the Muslim community's economy. It is motivated by the socio-economic inequality produced by a colonial structure that marginalized indigenous Muslim traders. The study employs a qualitative library research method with a historical approach and content analysis of primary sources, especially H.O.S. Tjokroaminoto's *Islam dan Sosialisme*, and secondary sources. The analysis distinguishes the actor level (*the figures' own ideas in their era*) from the analyst level (*a reading through the maqashid al-shari'ah framework*). The findings show that Sarekat Islam formulated the idea of 'Islamic socialism' as resistance to colonial capitalism while protecting indigenous traders; Muhammadiyah

*strengthened human capital and institutionalized philanthropy grounded in al-Ma'un theology; and Nahdlatul Ulama fostered a traders' cooperative through Nahdlatut Tujjar (1918) and a pesantren-based economy. Together they form a spectrum of Islamic economic responses converging on self-reliance, justice, and solidarity, despite differing social bases and strategies. The study concludes that pre-independence Islamic economic thought remains strongly relevant to contemporary community-based Islamic economics.*

**Keywords:** *Islamic Economics; Islamic Organizations; Nahdlatut Tujjar; Pre-Independence.*

---

## PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi pada masa pra-kemerdekaan. Pada periode tersebut, masyarakat pribumi menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan akibat struktur kolonial yang memarginalkan peran ekonomi umat Islam. Sistem hukum kolonial membagi penduduk ke dalam golongan Eropa, Timur Asing (*vreemde oosterlingen*), dan Bumiputera; pembagian ini menempatkan pedagang Tionghoa sebagai perantara ekonomi sekaligus membatasi mobilitas ekonomi pribumi (Ricklefs, 2008). Kondisi ini mendorong lahirnya kesadaran kolektif di kalangan umat Islam untuk membangun kekuatan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman (Noer, 1996).

Seiring kesadaran tersebut, organisasi Islam mulai memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran dan praktik ekonomi. Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama tidak hanya bergerak di bidang sosial-keagamaan, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sarekat Islam, misalnya, berawal sebagai gerakan ekonomi pedagang pribumi (Shiraishi, 1990), sementara pemimpinnya, H.O.S. Tjokroaminoto, kemudian merumuskan gagasan 'sosialisme Islam' sebagai kerangka ekonomi-politik alternatif (Tjokroaminoto, 1924/2008). Hal ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa itu telah memiliki dimensi gagasan sekaligus praksis.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas gerakan Islam pada masa ini. Noer (1996) memetakan pergerakan modern Islam 1900–1942; Korver (1985) dan Shiraishi (1990) menelaah Sarekat Islam sebagai gerakan massa; sedangkan Madnasir dan Ermawati (2023) menyoroti pola pemberdayaan ekonomi melalui Muhammadiyah dan NU pada konteks kontemporer. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti dimensi politik atau sosial-keagamaan, atau berfokus pada

praktik pemberdayaan masa kini, sehingga belum banyak yang membaca ketiga organisasi besar itu secara komparatif sebagai satu spektrum respons ekonomi Islam terhadap kolonialisme.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan, khususnya peran Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, serta merumuskan pola bersama dan perbedaannya sebagai satu bangunan respons ekonomi Islam yang relevan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan historis. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada pemikiran dan gerakan ekonomi Islam masa pra-kemerdekaan yang dianalisis melalui sumber-sumber tertulis. Dengan pendekatan kualitatif-historis, peneliti menempatkan data dalam konteks waktu dan kondisi sosial yang melatarinya sehingga pemahaman diperoleh secara mendalam dan kontekstual (Moleong, 2018).

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya tokoh pergerakan yang memuat gagasan ekonomi Islam, terutama *Islam dan Sosialisme* karya H.O.S. Tjokroaminoto (1924/2008), serta—sejauh dapat diakses—jejak dokumen organisasi dan pers pergerakan (misalnya *Medan Prijaji*). Sumber sekunder berupa kajian sejarah dan ekonomi Islam yang relevan (antara lain Noer, 1996; Korver, 1985; Shiraishi, 1990; Alfian, 1989; Anam, 1985; Karim, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan pada dua tataran yang dibedakan secara tegas. Pertama, *tataran aktor*, yaitu merekonstruksi gagasan dan praktik ekonomi sebagaimana dipahami dan dijalankan para tokoh serta organisasi pada zamannya. Kedua, *tataran analis*, yaitu membaca gagasan tersebut dengan kerangka ekonomi Islam kontemporer—khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip keadilan ekonomi (Chapra, 1992)—sebagai alat interpretasi peneliti, bukan sebagai istilah yang dipakai para aktor itu sendiri. Pembedaan ini penting untuk menghindari

anakronisme, yakni memaksakan kosakata ekonomi Islam modern ke dalam gerakan awal abad ke-20. Data lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk menemukan pola bersama dan perbedaan antarorganisasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Sosial-Ekonomi Umat Islam pada Masa Pra-Kemerdekaan**

Penelusuran historis memperlihatkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pra-kemerdekaan berada dalam tekanan struktur kolonial. Kebijakan ekonomi kolonial Belanda cenderung menguntungkan kelompok tertentu—pengusaha Eropa dan perantara Timur Asing—sementara masyarakat pribumi yang mayoritas Muslim mengalami marginalisasi dalam sektor perdagangan dan produksi (Ricklefs, 2008). Meskipun *Politik Etis* sejak awal abad ke-20 membuka akses pendidikan secara terbatas, kesenjangan ekonomi tetap lebar dan mendorong kesadaran kolektif untuk memperbaiki keadaan melalui gerakan berbasis keagamaan.

Keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, dan jaringan ekonomi menjadi faktor utama yang melemahkan posisi ekonomi umat Islam. Dari sinilah muncul kebutuhan membangun tatanan ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada pribumi. Secara analitis, kebutuhan tersebut dapat dibaca melalui prinsip keadilan (*'adl*), tolong-menolong (*ta'āwun*), dan keseimbangan (*tawāzun*) dalam ekonomi Islam (Chapra, 1992)—sebuah kerangka pembacaan peneliti, bukan istilah yang secara harfiah dipakai para aktor pada masa itu.

### **B. Peran Organisasi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

#### **1. Sarekat Islam: dari Gerakan Dagang ke Gagasan Sosialisme Islam**

Asal-usul Sarekat Islam menyimpan perdebatan historiografis yang perlu dikemukakan secara terbuka. Satu untai menunjuk pada Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dirintis Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 sebagai perhimpunan pedagang batik pribumi untuk mengimbangi dominasi pedagang Tionghoa. Untai lain menunjuk pada Sarekat Dagang Islamiyah yang digagas jurnalis R.M. Tirtoadisoerjo di Batavia (1909) dan Buitenzorg/Bogor (1910), yang disebarluaskan melalui surat kabar *Medan Prijaji* (Korver, 1985; Shiraishi, 1990).

Sebagian sumber bahkan menandai 1911 sebagai titik awal. Perbedaan ini bukan sekadar soal tanggal, melainkan soal siapa penggerak awal gerakan ekonomi pribumi; bahkan Samanhudi kemudian menyatakan Sarekat Islam tidak berhubungan langsung dengan SDI bentukan Tirtoadisoerjo. Penelitian ini memandang keduanya sebagai untai yang saling melengkapi: gerakan dagang pribumi tumbuh hampir bersamaan di beberapa kota sebagai respons atas tekanan ekonomi kolonial.

Pada 1912, di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini menjadi Sarekat Islam (SI) dan memperluas gerakannya dari ekonomi ke ranah sosial-politik (Noer, 1996). Pada tataran gagasan, kontribusi terpenting SI bagi pemikiran ekonomi Islam terletak pada rumusan Tjokroaminoto dalam *Islam dan Sosialisme*. Ia menawarkan 'sosialisme Islam' sebagai jalan tengah: menolak kapitalisme kolonial yang eksploitatif sekaligus menolak sosialisme ateistik. Baginya, Islam mengandung prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan tolong-menolong yang menentang individualisme, serta menuntut keadilan sosial dan pelarangan praktik yang menindas seperti riba (Tjokroaminoto, 1924/2008). Dengan demikian, SI tidak hanya membela pedagang pribumi secara praktis, tetapi juga meletakkan dasar wacana ekonomi Islam yang berorientasi pada pembebasan dan keadilan.

## **2. Muhammadiyah: Modal Manusia dan Filantropi Terlembaga**

Muhammadiyah didirikan K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Penting dicatat bahwa Dahlan sendiri adalah seorang saudagar batik dari kampung Kauman—sebuah komunitas pedagang Muslim—sehingga etos kewirausahaan menyatu dengan gerakan dakwahnya (Alfian, 1989). Kontribusi ekonomi Muhammadiyah pada masa pra-kemerdekaan lebih bertumpu pada penyiapan modal manusia dan filantropi terlembaga ketimbang pembentukan lembaga niaga berskala besar.

Basis teologisnya bersumber dari pemahaman Surah al-Mā'ūn, yang oleh Dahlan diterjemahkan menjadi aksi sosial-ekonomi nyata: memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, serta mendirikan sekolah, klinik, dan panti asuhan (seperti Penolong Kesengsaraan Oemoem/PKO). Rangkaian amal usaha ini pada hakikatnya merupakan mekanisme redistribusi dan penguatan kesejahteraan umat,

diperkuat pula peran 'Aisyiyah dalam pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga (Ma'arif, 1996; Noer, 1996). Dengan demikian, sumbangan Muhammadiyah bersifat mendasar meski tidak selalu berbentuk kelembagaan ekonomi langsung; adapun lembaga keuangan mikro syariah formal seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan perkembangan era kontemporer, bukan bagian dari praktik pra-kemerdekaan.

### **3. Nahdlatul Ulama: Nahdlatut Tujjar dan Ekonomi Pesantren**

Nahdlatul Ulama (NU) resmi berdiri pada 31 Januari 1926 di bawah K.H. Hasyim Asy'ari. Namun akar ekonominya telah tumbuh lebih dahulu melalui Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Kaum Pedagang), yang didirikan pada 1918 atas prakarsa K.H. Abdul Wahab Chasbullah bersama K.H. Hasyim Asy'ari (Anam, 1985; Dhofier, 2011). Gagasan yang mendasarinya jelas: kemandirian ekonomi umat sebagai prasyarat kemandirian gerakan keagamaan, agar tidak bergantung pada sistem ekonomi kolonial.

Nahdlatut Tujjar mewujudkan dalam badan usaha bercorak koperasi, yakni Syirkatul 'Inan—sebuah bentuk kerja sama modal (*syirkah*) yang berlandaskan prinsip *ta'āwun*—yang menghimpun pedagang dan pengusaha di kawasan Surabaya, Kediri, dan Jombang serta mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam aktivitas perdagangan dan pertanian (Anam, 1985). Lembaga ini menjadi embrio ekonomi bagi berdirinya NU dan menopang pembiayaan pergerakan ulama. Berbasis jaringan pesantren, NU kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi lokal (Madnasir & Ermawati, 2023). Adapun kelembagaan modern seperti Lembaga Perekonomian NU (LPNU) merupakan kelanjutan kontemporer dari semangat yang telah dirintis Nahdlatut Tujjar.

### **C. Pemikiran Ekonomi Islam sebagai Respons terhadap Kolonialisme**

Pada tataran aktor, pemikiran ekonomi Islam masa ini berkembang bukan sebagai teori abstrak, melainkan sebagai respons langsung terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial. Gagasan Tjokroaminoto tentang 'sosialisme Islam', semangat koperasi Nahdlatut Tujjar, dan etos filantropi Muhammadiyah sama-sama lahir dari kebutuhan membebaskan umat dari ketergantungan dan penindasan ekonomi (Tjokroaminoto, 1924/2008; Anam, 1985).

Respons tersebut juga tampak dalam penguatan instrumen ekonomi berbasis syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang difungsikan sebagai jaring redistribusi sosial, serta dalam pemanfaatan bentuk koperasi sebagai wadah kerja sama ekonomi umat—yang belakangan turut diatur melalui regulasi koperasi kolonial (Ordonansi Koperasi 1927). Pada tataran analisis, seluruh praktik ini dapat dibaca melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perwujudan keadilan distributif (Chapra, 1992). Temuan ini sejalan dengan Noer (1996) yang menegaskan bahwa gerakan Islam awal abad ke-20 memadukan pembaruan keagamaan dengan agenda sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat argumen Karim (2018) bahwa pemikiran ekonomi Islam selalu berpijak pada realitas dan kebutuhan umat pada zamannya.

#### D. Sintesis: Pola Bersama dan Perbedaan Ketiga Organisasi

Membandingkan ketiga organisasi memperlihatkan bahwa mereka membentuk satu spektrum respons ekonomi Islam terhadap kolonialisme, bukan tiga gerakan yang terpisah. Terdapat tiga pola bersama. Pertama, orientasi pada kemandirian ekonomi umat sebagai perlawanan terhadap dominasi ekonomi asing dan kolonial. Kedua, penekanan pada solidaritas dan tolong-menolong (*ta'āwun*) sebagai basis ekonomi, berlawanan dengan individualisme kapitalisme. Ketiga, integrasi nilai-nilai Islam—keadilan, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab sosial—ke dalam aktivitas ekonomi.

**Tabel 1. Perbandingan Gerakan Ekonomi Tiga Organisasi Islam Pra-Kemerdekaan**

| Organisasi      | Basis Sosial               | Bentuk Gerakan Ekonomi                        | Kontribusi Pemikiran                                                        |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sarekat Islam   | Pedagang & massa perkotaan | Proteksi dagang pribumi; mobilisasi massa     | Gagasan 'sosialisme Islam' (keadilan, anti-kapitalisme kolonial, anti-riba) |
| Muhammadiyah    | Modernis urban terdidik    | Pendidikan, klinik, panti (PKO); 'Aisyiyah    | Modal manusia & filantropi terlembaga berbasis teologi al-Mā'ūn             |
| Nahdlatul Ulama | Jaringan ulama-pesantren   | Koperasi pedagang (Nahdlatut Tujjar/Syirkatul | Kemandirian ekonomi umat berbasis syirkah &                                 |

| Organisasi | Basis Sosial | Bentuk Gerakan Ekonomi    | Kontribusi Pemikiran |
|------------|--------------|---------------------------|----------------------|
|            |              | 'Inan); ekonomi pesantren | ta'āwun              |

Sumber: diolah dari Noer (1996), Korver (1985), Alfian (1989), Anam (1985), dan Tjokroaminoto (1924/2008).

Namun, ketiganya berbeda dalam strategi dan basis sosial. Sarekat Islam bertumpu pada mobilisasi massa pedagang perkotaan dan artikulasi wacana ekonomi-politik ('sosialisme Islam'); Muhammadiyah bertumpu pada kalangan modernis urban terdidik dengan penekanan pada modal manusia dan filantropi terlembaga; sedangkan Nahdlatut Tujjar/NU bertumpu pada jaringan ulama-pesantren dengan model koperasi dan ekonomi kerakyatan. Perbedaan strategi ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan basis sosial masing-masing. Dengan demikian, kontribusi utama kajian ini adalah menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pra-kemerdekaan bukanlah doktrin tunggal yang seragam, melainkan konvergensi berbagai jalan menuju tujuan yang sama: kemandirian dan keadilan ekonomi umat.

#### **E. Relevansi terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer**

Spektrum respons tersebut memiliki relevansi kuat dengan ekonomi Islam kontemporer. Nilai kemandirian, keadilan, dan solidaritas sosial tetap menjadi prinsip utama dalam pengembangan keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Madnasir & Ermawati, 2023). Semangat koperasi Nahdlatut Tujjar, misalnya, menemukan kelanjutannya dalam lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, dan kewirausahaan syariah; gagasan keadilan ekonomi Tjokroaminoto beresonansi dengan kritik kontemporer terhadap ketimpangan; sedangkan model filantropi Muhammadiyah relevan dengan penguatan zakat, wakaf produktif, dan ekonomi sosial masa kini.

Dengan demikian, kajian atas sejarah pemikiran ekonomi Islam ini bukan sekadar rekonstruksi masa lalu, tetapi memberikan pelajaran strategis: penguatan ekonomi umat paling efektif ketika memadukan tiga kekuatan yang dahulu terpisah—wacana keadilan, modal manusia, dan kelembagaan koperasi—dalam satu ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan (Karim, 2018).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan lahir sebagai respons terhadap ketimpangan yang ditimbulkan struktur kolonial. Sarekat Islam menyumbang gagasan 'sosialisme Islam' sekaligus melindungi pedagang pribumi; Muhammadiyah memperkuat modal manusia dan filantropi terlembaga berbasis teologi al-Mā'ūn; sementara Nahdlatul Ulama menumbuhkan koperasi pedagang melalui Nahdlatut Tujjar (1918) dan ekonomi pesantren.

Secara komparatif, ketiganya membentuk satu spektrum respons yang konvergen pada kemandirian, keadilan, dan solidaritas, meski berbeda strategi dan basis sosial. Inilah kontribusi utama kajian: membaca ketiga organisasi bukan sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai satu bangunan respons ekonomi Islam terhadap kolonialisme. Warisan ini memiliki relevansi kuat bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer yang adil, mandiri, dan berbasis komunitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian pustaka dengan sumber primer yang terbatas dan belum menyertakan penelusuran arsip kolonial maupun dokumen internal organisasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggali arsip primer dan pers pergerakan, serta melakukan studi komparatif yang lebih rinci untuk memperkuat rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam pra-kemerdekaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The political behavior of a Muslim modernist organization under Dutch colonialism*. Gadjah Mada University Press.
- Anam, C. (1985). *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama*. Jatayu.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Karim, A. A. (2018). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Ed. rev.). Rajawali Pers.
- Korver, A. P. E. (1985). *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* (Terj.). Grafiti Pers.
- Ma'arif, A. S. (1996). *Islam dan politik: Teori belah bambu masa demokrasi terpimpin*. Gema Insani Press.
- Madnasir, & Ermawati, L. (2023). Pola pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

organisasi masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama relevansinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 209–218.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Noer, D. (1996). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Serambi.

Shiraishi, T. (1990). *An age in motion: Popular radicalism in Java, 1912–1926*. Cornell University Press.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tjokroaminoto, H. O. S. (2008). *Islam dan sosialisme*. Segi Arsy. (Karya asli diterbitkan 1924)